

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arifin Tahir, 2011, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT. Pustaka Indonesia Press, Jakarta Pusat.
- Budi. Winarno, 2008, *Kebijakan publik teori dan proses*, Buku kita, Jakarta.
- Effendi Sofyan, 1997. *Manajemen Pelayanan Umum*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi. Aksara, Jakarta.
- Mahmudi, 2015, *Manajemen Kinerja, Sektor Publik*, Edisi Ketiga, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Ninggolan, 1997, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, PT Pertja, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philipus Handjon, 1994, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Jogjakarta, Gadjahmada Pres.
- Pramusinto, Agus dan Kumorotomo, Wahyudi, 2009, *Governance Reform di Indonesia, Mencari Arah Kelembagaan Politik Yang Demokratis dan Birokrasi Yang Profesional*, Gava Media, Yogyakarta.
- Prof. Dr. H. Murtir Jeddawi, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Total Media, Yogyakarta.
- Riant, Nugroho, 2004, *Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi*, Gramedia, Jakarta.
- Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa BAB Pokok Hukum Administrasi Negara*, Surabaya, Laksbang.
- Setiono, 2005, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana UNS, Surakarta.
- Siti Sutami, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung, Refika Aitama.
- Sri Hartini, S.H., M.H. dan Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H., 2017, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sri Ratin, 2014, *Bahan Ajar Mata Kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- .Suharsimi Arikunto, 2013, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 1981, *Metodologi Research I*; YPPF UGM, Yogyakarta.
- Syukhadak, Mukhamad, 1996, *Administrasi Kepegawaian Negara Teori dan Praktik Penyelenggaraannya di Indonesia*. PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik*, Lukman, Yogyakarta.

Jurnal

- Daryanto, 2017, *Merit System Dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, Volume 1, Nomor 2. Hal 1.
- Malah Luaq, 2017, *Studi Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda*, eJournal Administrative Reform, 2017.
- Meyrina, 2016, *Implementasi Peningkatan Kinerja Melalui Merit Sistem Guna Melaksanakan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara No 5 Tahun 2014 Di Kementerian Hukum dan Ham*, JIKH, Vol. 10, Nomor 2.
- Nur Ihsan, 2017, *Evaluasi Implementasi Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 2, Januari 2017.
- Prasojo, Eko & Laode Rudita, 2014, *Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Membangun Profesionalisme Aparatur Sipil Negara*, dalam Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, Vol. 8, Nomor. 1.
- Rahman, Abdul, 2019, *Penataan Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Melalui Dynamic Governance*. Jurnal Konstituen, 2656-0925, Vol. 1, Nomor 1.
- Warna, 2017, *Implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan PNS Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah*, e Jurnal Katalogis, Vol. 5, Nomor 2 Februari 2017.
- Woodard, C.A, 2005, *Merit by Any Other Name: Reframing the Civil Service First Principle*, *Public Administration Review*. Vol 65, No. 1, pp 109.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 45.1 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.